



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN PERANGKAT DAERAH
(DPA- SKPD)**

Nomor :

DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5 – Unsur Penunjang Urusan Pemerintah
5 – Unsur Penunjang Urusan Pemerintah
Bidang Urusan : 5.01 – Perencanaan
5.05 – Penelitian dan Pengembangan
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.42.000 – Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : Dr. Setiawan Aswad., M.Dev.Plg
NIP : [REDACTED]
JABATAN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah



Provinsi Sulawesi Selatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN : 5.01 - PERENCANAAN
: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

a. Nama : Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg

b. NIP : 1 [redacted]

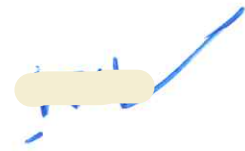
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Makassar, Tanggal 02 Januari 2025
Pengguna Anggaran


Salehuddin, S.Kom., M.Si
NIP: 197 [redacted] 007


Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
NIP: 19 [redacted] 1002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 269 Telepon (0411) 453202
MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR 900/94/I/BKAD
TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 278);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 332);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 335);

38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya;
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 46);
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
41. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 34);
42. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014, Tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2/I/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. URUSAN | : | PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN |
| 2. ORGANISASI | : | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN |
| 3. PENDAPATAN | : | Rp. 32.100.000,00 |
| 4. BELANJA : | | |
| a. Belanja Operasi | : | Rp. 49.897.749.874,00 |
| b. Belanja Modal | : | Rp. 113.340.610,00 |
| | | ----- |
| Jumlah | : | Rp. 50.011.090.484,00 |

KEDUA : Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan mempedomani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Disahkan di Makassar

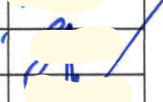
Pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA- SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025				
Organisas : 5.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN i DAERAH				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening		Uraian		Jumlah (Rp)
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp32.100.000,00
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp32.100.000,00
		Jumlah Pendapatan		Rp32.100.000,00
5	1	BELANJA OPERASI		Rp49.897.749.874,00
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp30.998.478.971,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.899.270.903,00
5	2	BELANJA MODAL		Rp113.340.610,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp98.132.000,00
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp15.208.610,00
		Jumlah Belanja		Rp50.011.090.484,00
		Total Surplus/(Defisit)		(Rp49.978.990.484,00)
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0,00
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0,00
		Pembiayaan Neto		Rp0,00
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Makassar, Tanggal 02 Januari 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  <u>Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg</u> NIP. 197 Mengesahkan, PPKD  <u>Salehuddin, S.Kom., M.Si</u> NIP. 19
Januari	Rp2.354.000,00	Januari	Rp8.703.190.514,00	
Februari	Rp2.354.000,00	Februari	Rp966.888.174,00	
Maret	Rp2.354.000,00	Maret	Rp1.334.710.719,00	
April	Rp2.568.000,00	April	Rp9.797.157.669,70	
Mei	Rp2.568.000,00	Mei	Rp1.173.222.015,00	
Juni	Rp2.568.000,00	Juni	Rp1.029.932.531,30	
Juli	Rp2.675.000,00	Juli	Rp9.938.600.419,00	
Agustus	Rp2.675.000,00	Agustus	Rp1.347.309.785,00	
September	Rp2.675.000,00	September	Rp1.216.862.417,00	
Oktober	Rp3.103.000,00	Oktober	Rp12.103.025.266,30	
November	Rp3.103.000,00	November	Rp1.450.988.953,00	
Desember	Rp3.103.000,00	Desember	Rp949.202.020,70	
Jumlah	Rp32.100.000,00	Jumlah	Rp50.011.090.484,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Setiawan Aswad, M. Dev. Plg	002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Salehuddin, S.Kom., M.Si	19	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Kasman, S.Hut., M.M	21001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4	Bustanul Arifin, SH., MM	198	Kepala Biro Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD					
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025													
SKPD : 5.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								Rp49.897.749.874,00	Rp113.340.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.011.090.484,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp49.897.749.874,00	Rp113.340.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.011.090.484,00	
5	01				PERENCANAAN			Rp48.843.931.674,00	Rp110.340.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.954.272.284,00	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp39.569.217.624,00	Rp110.340.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.679.558.234,00	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp321.033.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.033.800,00	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp106.373.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.373.400,00	
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp88.581.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.581.200,00	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp126.079.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.079.200,00	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp32.269.804.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.269.804.571,00	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp32.059.878.971,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.059.878.971,00	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp39.327.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.327.700,00	
5	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp27.248.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.248.600,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.576.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.576.600,00		
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp132.772.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.772.700,00		
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp123.411.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.411.400,00		
5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.088.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.088.200,00		
5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.619.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.619.200,00		
5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp76.704.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.704.000,00		
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp247.159.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.159.700,00		
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp88.438.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.438.400,00		
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp79.809.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.809.100,00		
5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp78.912.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.912.200,00		
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp1.576.753.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.576.753.800,00		
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp115.865.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.865.400,00		
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp215.282.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.282.800,00		
5	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp78.558.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.558.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp203.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.950.000,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp940.798.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp940.798.800,00	
5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp22.298.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.298.800,00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp45.000.000,00	Rp110.340.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.340.610,00	
5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp45.000.000,00	Rp12.208.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.208.610,00	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp98.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.132.000,00	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp3.255.490.353,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.255.490.353,00	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp26.242.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.242.045,00	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.229.248.308,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.229.248.308,00	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.730.564.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.730.564.000,00	
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp357.187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.187.000,00	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp520.706.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp520.706.000,00	
5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp127.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp575.671.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.671.000,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Rp6.914.761.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.914.761.750,00	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Rp1.911.573.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.911.573.200,00	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp13.529.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.529.500,00	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.898.043.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.898.043.700,00	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp28.853.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.853.950,00	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.595.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.595.350,00	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.589.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.589.600,00	
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.669.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.669.000,00	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp4.970.919.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.970.919.800,00	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.727.863.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.727.863.900,00	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp160.911.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.911.900,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	01	02	1.03	0004	Facilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp82.144.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.144.000,00		
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			Rp3.414.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.414.800,00		
5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.414.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.414.800,00		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp2.359.952.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.359.952.300,00		
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Rp756.785.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp756.785.800,00		
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp138.171.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.171.900,00		
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp116.103.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.103.100,00		
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp120.918.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.918.200,00		
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp171.857.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.857.000,00		
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp88.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.130.000,00		
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp121.605.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.605.600,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Rp849.769.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp849.769.900,00	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp76.684.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.684.100,00	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp135.195.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.195.500,00	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp261.983.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp261.983.800,00	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.336.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.336.400,00	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp132.524.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.524.700,00	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp164.045.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.045.400,00	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Rp753.396.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp753.396.600,00	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp92.544.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.544.700,00	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp110.462.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.462.800,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp186.367.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.367.350,00		
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp95.357.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.357.100,00		
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp111.387.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.387.400,00		
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp157.277.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.277.250,00		
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			Rp1.053.818.200,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.056.818.200,00		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Rp1.053.818.200,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.056.818.200,00		
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Rp484.238.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp484.238.200,00		
5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp200.003.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.003.100,00		
5	05	02	1.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp284.235.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.235.100,00		
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			Rp2.169.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.169.400,00		
5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.075.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.075.800,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.093.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.093.600,00	
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				Rp204.376.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.376.500,00	
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.003.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.003.100,00	
5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.153.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.153.600,00	
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.153.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.153.600,00	
5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.153.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.153.600,00	
5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp912.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp912.600,00	
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Rp363.034.100,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp366.034.100,00	
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp996.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp996.400,00	
5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.482.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.482.600,00	
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp206.170.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.170.600,00	
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.185.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.185.900,00	
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.198.600,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.198.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.703.190.514,00
Februari	Rp966.888.174,00
Maret	Rp1.334.710.719,00
April	Rp9.797.157.669,70
Mei	Rp1.173.222.015,00
Juni	Rp1.029.932.531,30
Juli	Rp9.938.600.419,00
Agustus	Rp1.347.309.785,00
September	Rp1.216.862.417,00
Oktober	Rp12.103.025.266,30
November	Rp1.450.988.953,00
Desember	Rp949.202.020,70
Jumlah	Rp50.011.090.484,00

Makassar, Tanggal 02 Januari 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
NIP. 1973

Mengesahkan,
PPKD

Salehuddin, S.Kom., M.Si
NIP. 1977050

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Setiawan Aswad, M. Dev. Plg	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Salehuddin, S.Kom., M.Si	1007	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Kasman, S.Hut., M.M	19841	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
4.	Bustanul Arifin, SH., MM	011023	Kepala Biro Organisasi	

*) Sesuai periodisasi SPD